

## Potret implementasi CSR dalam konteks laporan keberlanjutan: Studi kasus PT Vale Indonesia di Sorowako

St. Nur' Azizah Tompunu\*, Ainun Arizah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

\*) Korespondensi (e-mail: [Azizahtompunu@gmail.com](mailto:Azizahtompunu@gmail.com))

### Abstract

This study examines the gap between sustainability narratives in PT Vale Indonesia's 2024 Sustainability Report and the socio-environmental realities surrounding its CSR practices in Sorowako, Indonesia. The research employs a descriptive qualitative approach based on document study, comparing the company's report with documents from civil society organizations. Legitimacy theory and stakeholder theory frame the analysis to interpret how the sustainability image is constructed and how stakeholder expectations are addressed. Findings reveal three key gaps: limited and non-representative community participation, minimal disclosure of unresolved ongoing environmental impacts, and CSR programs predominantly oriented toward activities rather than long-term socio-economic benefits for local communities. The results indicate that the company's sustainability reporting remains largely affirmative and procedural, while external documents emphasize persistent ecological risks and unmet public expectations. This study recommends enhanced transparency of mining impact disclosures, broader and inclusive community engagement in CSR evaluation, and periodic independent assessments of sustainability outcomes.

Keywords: Corporate Social Responsibility, Legitimacy Theory, PT Vale Indonesia; Stakeholder Theory, Sustainability Report.

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengkaji kesenjangan antara narasi keberlanjutan dalam Laporan Keberlanjutan PT Vale Indonesia Tbk 2024 dengan realitas sosial dan lingkungan di Sorowako, khususnya pada praktik CSR. Studi menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi dokumen, dengan membandingkan laporan perusahaan dan dokumen pembanding dari organisasi masyarakat sipil. Teori legitimasi dan teori stakeholder digunakan untuk membaca strategi perusahaan dalam membangun citra keberlanjutan dan merespons ekspektasi pemangku kepentingan. Hasil analisis menunjukkan tiga gap utama, yaitu partisipasi masyarakat yang terbatas dan tidak representatif, minimnya penjelasan tindak lanjut dampak lingkungan yang masih berlangsung, serta orientasi program CSR yang berfokus pada aktivitas, bukan keberlanjutan manfaat ekonomi-sosial jangka panjang bagi komunitas lokal. Temuan ini menegaskan bahwa laporan keberlanjutan lebih afirmatif dan prosedural, sementara dokumen eksternal menyoroti dampak ekologis dan kebutuhan publik yang belum sepenuhnya terakomodasi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan transparansi pengungkapan dampak tambang, perluasan pelibatan komunitas dalam evaluasi CSR, dan penerapan penilaian independen secara berkala.

Kata kunci: Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Teori Legitimasi, PT Vale Indonesia, Teori Pemangku Kepentingan, Laporan Keberlanjutan.

---

How to cite: Tompunu, S. N. A., & Tompunu, A. (2025). Potret implementasi CSR dalam konteks laporan keberlanjutan: Studi kasus PT Vale Indonesia di Sorowako. *Journal of Economics Research and Policy Studies*, 5(3), 831–844. <https://doi.org/10.53088/jerps.v5i3.2233>

---



## 1. Pendahuluan

Keberlanjutan telah menjadi isu sentral dalam praktik bisnis modern seiring meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Perusahaan tidak lagi dinilai semata-mata berdasarkan capaian finansial, tetapi juga berdasarkan kontribusinya terhadap kesejahteraan sosial, pelestarian lingkungan, serta keberlanjutan jangka panjang. Dalam konteks ini, *Corporate Social Responsibility* (CSR) dipahami sebagai bentuk komitmen perusahaan untuk menjalankan aktivitas bisnis yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan ekologis dari operasionalnya. CSR kemudian menjadi bagian integral dari strategi perusahaan, khususnya pada sektor industri yang memiliki risiko sosial dan lingkungan yang tinggi, seperti pertambangan (Jenkins & Yakovleva, 2006).

Sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan CSR, perusahaan diwajibkan untuk menyampaikan informasi terkait kinerja sosial dan lingkungannya melalui laporan keberlanjutan. Laporan ini berfungsi sebagai media komunikasi antara perusahaan dan para pemangku kepentingan, yang mencerminkan komitmen, kebijakan, serta capaian program tanggung jawab sosial dan lingkungan. Laporan keberlanjutan secara ideal menggambarkan kontribusi perusahaan terhadap aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan secara transparan dan komprehensif (Khairunnisa & Rosdiana, 2024). Melalui laporan tersebut, perusahaan berupaya membangun kepercayaan publik, meningkatkan legitimasi sosial, serta menunjukkan kepatuhan terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan CSR yang dilaporkan secara konsisten dapat memberikan dampak positif bagi perusahaan. Yasin *et al* (2024), yang menyatakan bahwa berperan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan serta memperkuat reputasi korporasi di mata publik. Reputasi yang baik ini pada akhirnya dapat memberikan keuntungan jangka panjang bagi perusahaan, baik dalam bentuk penerimaan sosial (*social license to operate*) maupun keberlanjutan operasional. Namun demikian, efektivitas laporan keberlanjutan sangat bergantung pada sejauh mana informasi yang disajikan benar-benar mencerminkan praktik CSR yang dijalankan di lapangan.

Dalam praktiknya, laporan keberlanjutan tidak jarang dipandang sebagai dokumen normatif yang sarat dengan narasi positif perusahaan. Beberapa studi mengungkapkan adanya kesenjangan antara narasi dalam laporan keberlanjutan dengan realitas implementasi CSR di lapangan. Gresya dan Surianti (2024) menemukan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keberlanjutan tidak selalu selaras dengan kondisi yang dialami oleh masyarakat sekitar wilayah operasional perusahaan. Kesenjangan ini berpotensi menimbulkan keraguan terhadap akuntabilitas perusahaan, serta memunculkan dugaan bahwa laporan keberlanjutan lebih berfungsi sebagai alat pencitraan dibandingkan sebagai sarana transparansi.

Fenomena tersebut semakin relevan untuk dikaji pada sektor pertambangan yang memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat

sekitar. Aktivitas pertambangan kerap dikaitkan dengan isu degradasi lingkungan, perubahan struktur sosial, serta ketergantungan ekonomi masyarakat lokal terhadap perusahaan (Hilson, 2012). Oleh karena itu, pelaksanaan CSR pada sektor ini seharusnya tidak hanya bersifat formalitas, tetapi mampu memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat. Ketika terdapat perbedaan antara apa yang dilaporkan dan apa yang dirasakan oleh masyarakat, maka tujuan utama CSR sebagai instrumen pembangunan sosial menjadi dipertanyakan.

PT Vale Indonesia dipilih sebagai objek penelitian karena merupakan salah satu perusahaan pertambangan terbesar di Indonesia yang secara konsisten menerbitkan laporan keberlanjutan setiap tahun. Perusahaan ini beroperasi di Sorowako, sebuah wilayah dengan karakter sosial dan ekologis yang khas, serta menjadi lokasi utama berbagai program CSR yang dilaksanakan perusahaan. Sorowako juga kerap menjadi sorotan publik terkait isu keberlanjutan, keterlibatan masyarakat lokal, serta dampak aktivitas pertambangan terhadap lingkungan dan kehidupan sosial. Kompleksitas kondisi wilayah ini menjadikannya relevan sebagai konteks penelitian untuk menilai kesesuaian antara narasi keberlanjutan dalam laporan perusahaan dengan realitas di lapangan, khususnya dalam konteks negara berkembang (Muttakin & Khan, 2014).

Selain itu, Sorowako memiliki tantangan tersendiri, seperti keterisolasian wilayah, ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap perusahaan, serta ketidakjelasan indikator keberhasilan program CSR. Kondisi tersebut membuka ruang terjadinya ketimpangan antara klaim keberhasilan program dalam laporan keberlanjutan dengan pengalaman nyata masyarakat penerima manfaat. Dalam konteks ini, potensi terjadinya *greenwashing* menjadi isu yang perlu dicermati secara kritis, mengingat laporan keberlanjutan dapat digunakan untuk membentuk citra positif perusahaan tanpa diimbangi dengan dampak nyata yang dirasakan oleh masyarakat (Lyon & Montgomery, 2015).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian antara isi laporan keberlanjutan PT Vale Indonesia dengan implementasi nyata program CSR di Sorowako. Pendekatan kualitatif-deskriptif digunakan untuk mengeksplorasi bukti empiris dari masyarakat lokal dan pihak independen, sehingga dapat mengidentifikasi potensi kesenjangan antara dokumen formal perusahaan dan praktik CSR yang dijalankan. Kontribusi penelitian ini terletak pada upayanya memperkaya literatur CSR di sektor pertambangan, khususnya terkait efektivitas pelaporan keberlanjutan dalam mencerminkan kondisi aktual. Temuan penelitian diharapkan dapat memperkuat landasan bagi perusahaan dan regulator dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas implementasi program tanggung jawab sosial dan lingkungan.

## 2. Tinjauan Pustaka

### ***Corporate Social Responsibility (CSR)* dalam Konteks Perusahaan**

*Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah konsep yang mengacu pada tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan. CSR bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara tujuan ekonomi perusahaan dan manfaat sosial

serta lingkungan. Menurut Carroll (1999), CSR mencakup empat kategori utama, yaitu tanggung jawab ekonomi, hukum, etika, dan filantropis. Dalam prakteknya, perusahaan yang mengimplementasikan CSR berupaya untuk tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan sosial dan lingkungan. Hal ini juga diperkuat oleh (Fadillah *et al.*, 2024), yang menunjukkan bahwa pelaksanaan CSR yang efektif berdampak signifikan terhadap peningkatan kinerja keuangan perusahaan, menegaskan peran strategis CSR dalam mendukung keberlanjutan bisnis.

CSR juga menjadi indikator penting dalam menilai reputasi perusahaan di mata publik dan stakeholder. Laporan keberlanjutan sering digunakan untuk menunjukkan sejauh mana perusahaan telah memenuhi tanggung jawab sosialnya (Gresya & Surianti, 2024). Laporan ini biasanya mencakup informasi tentang program-program CSR yang dilaksanakan, hasil yang dicapai, serta dampak yang dihasilkan. Namun, penelitian menunjukkan bahwa meskipun laporan ini dibuat dengan tujuan transparansi, seringkali ada kesenjangan antara apa yang tercantum dalam laporan dan realitas di lapangan (Handayani & Sari, 2025).

### **Laporan Keberlanjutan dan Transparansi**

Laporan keberlanjutan sering dianggap sebagai alat penting bagi perusahaan untuk menyampaikan informasi terkait dampak sosial dan lingkungan dari operasional mereka. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan. Menurut Khairunnisa & Rosdiana (2024), laporan keberlanjutan yang efektif harus mencakup aspek-aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan secara holistik. Namun, laporan keberlanjutan seringkali tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi nyata di lapangan. Salah satu alasan utama adalah adanya tekanan bagi perusahaan untuk menunjukkan pencapaian yang positif, yang sering kali tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Gressy & Setiawan (2024), menambahkan bahwa selama 15 tahun terakhir penelitian mengenai CSR menunjukkan semakin kompleksnya pendekatan yang digunakan dalam mengkaji gap antara pelaporan formal dan praktik implementasi, termasuk dalam konteks transparansi dan akuntabilitas laporan keberlanjutan.

Penelitian yang dilakukan oleh KPMG International (2020) menemukan bahwa meskipun semakin banyak perusahaan yang mengungkapkan informasi terkait keberlanjutan melalui laporan tahunan mereka, masih terdapat ketidaksesuaian yang signifikan antara apa yang diklaim dalam laporan dengan tindakan nyata perusahaan. Hal ini menimbulkan pertanyaan terkait transparansi dan akuntabilitas dari laporan keberlanjutan yang dipublikasikan oleh perusahaan-perusahaan besar, termasuk PT Vale Indonesia.

### **Corporate Social Responsibility (CSR) di Sektor Pertambangan**

Pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) di sektor pertambangan memiliki kompleksitas tersendiri. Rohim & Hamid (2023), mengkaji pelaksanaan CSR oleh PT Vale Indonesia di Sorowako melalui Program Pengembangan Kawasan Perdesaan Mandiri (PKPM). Program ini mencakup pemberdayaan masyarakat dalam

bidang pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Namun, studi ini juga menggarisbawahi adanya tantangan dalam implementasi, seperti sulitnya menjangkau wilayah terpencil dan rendahnya partisipasi masyarakat.

Anugerah & Sisdianto (2024), juga mengangkat isu yang sama, yaitu keterbatasan efektivitas implementasi CSR pada perusahaan pertambangan. Mereka menekankan bahwa meskipun laporan keberlanjutan perusahaan menunjukkan hasil yang positif, hal tersebut belum tentu mencerminkan kondisi di lapangan. Banyak perusahaan masih menggunakan CSR sebagai alat pencitraan, tanpa memastikan bahwa program yang dilaporkan benar-benar berdampak.

### **Kesenjangan antara Laporan Keberlanjutan dan Implementasi CSR**

Fenomena kesenjangan antara laporan keberlanjutan dan implementasi CSR telah menjadi perhatian dalam berbagai penelitian. Anugerah & Sisdianto (2024), menemukan bahwa pelaporan keberlanjutan sering kali tidak mencerminkan realitas pelaksanaan program di lapangan. Faktor-faktor seperti lemahnya koordinasi antar unit, ketidakjelasan tujuan CSR, dan tantangan geografis seringkali menjadi penyebab ketidaksesuaian ini.

Hal ini juga tercermin dalam Laporan Keberlanjutan PT Vale Indonesia tahun 2023, yang memuat berbagai komitmen dan capaian dalam bidang sosial dan lingkungan. Meskipun demikian, tanpa adanya evaluasi independen terhadap dampak riil di masyarakat, sulit untuk menilai sejauh mana pelaksanaan CSR tersebut benar-benar sesuai dengan laporan. Oleh karena itu, tinjauan pustaka ini menunjukkan bahwa terdapat kebutuhan untuk melakukan analisis kritis terhadap kesesuaian antara laporan keberlanjutan dan implementasi program CSR, terutama dalam konteks perusahaan pertambangan yang beroperasi di wilayah-wilayah dengan tantangan sosial dan geografis yang kompleks.

### **3. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi dokumen. Teknik ini melibatkan analisis terhadap dokumen tertulis seperti Laporan Keberlanjutan PT Vale Indonesia Tbk tahun 2024, yang kemudian dibandingkan dengan dokumen pendukung dari organisasi masyarakat sipil seperti WALHI dan APL sebagai sumber informasi eksternal yang relevan. Studi dokumen dinilai efektif dalam mengungkap realitas sosial dan lingkungan berdasarkan narasi formal yang disampaikan perusahaan (Irmayana *et al.*, 2020).

Dalam pemilihan dokumen, penelitian ini menerapkan kriteria seleksi, yaitu dokumen harus: (1) memiliki keterkaitan langsung dengan isu lingkungan, sosial, atau program CSR PT Vale, (2) berasal dari sumber lembaga yang memiliki kredibilitas dan rekam jejak advokasi yang jelas, (3) dipublikasikan dalam periode yang sejalan dengan objek penelitian, dan (4) memuat data atau pernyataan yang dapat ditelaah untuk menjelaskan situasi faktual di lapangan.

Teknik analisis dokumen dilakukan melalui tiga tahapan utama. Pertama, peneliti melakukan reduksi data, dengan menandai bagian dokumen yang memuat isu

dampak lingkungan, kegiatan CSR, hubungan dengan masyarakat, atau kebijakan perusahaan. Kedua, peneliti melakukan pemaparan data secara tematik, dengan mengelompokkan temuan sesuai isu yang muncul dominan antar dokumen. Ketiga, peneliti melakukan verifikasi dan penarikan makna, yakni menelaah apakah narasi keberlanjutan dan CSR perusahaan menunjukkan konsistensi informasi, keberpihakan isu, serta kesesuaian dengan narasi lembaga eksternal.

Sebagai kerangka analisis, penelitian ini menggunakan teori legitimasi dan teori *stakeholder*. Teori legitimasi menyatakan bahwa organisasi berupaya memastikan bahwa aktivitasnya dianggap sah oleh masyarakat sesuai nilai-nilai sosial yang berlaku (Suchman, 1995). Sementara itu, teori *stakeholder* menekankan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi juga kepada seluruh pemangku kepentingan seperti masyarakat lokal, pemerintah, dan organisasi lingkungan (Freeman, 1984). Penggunaan teori ini membantu peneliti mengevaluasi apakah program CSR dan laporan keberlanjutan PT Vale telah mencerminkan respons yang adil terhadap harapan para *stakeholder* tersebut. Dengan kombinasi metode studi dokumen dan kerangka teori ini, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi kesenjangan antara narasi perusahaan dan realitas di lapangan secara lebih objektif dan kontekstual.

#### 4. Hasil dan Pembahasan

##### **Hasil Pengungkapan Laporan Keberlanjutan PT Vale Indonesia Tbk 2024**

PT Vale Indonesia Tbk dalam Laporan Keberlanjutan tahun 2024 menegaskan komitmennya terhadap pembangunan berkelanjutan melalui pendekatan yang mencakup tiga aspek utama: lingkungan (*environmental*), sosial (*social*), dan tata kelola (*governance/ESG*). Perusahaan menyatakan bahwa strategi keberlanjutan dijalankan sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) serta standar *Global Reporting Initiative* (GRI) (PT Vale Indonesia, 2024).

##### ***Pengelolaan Lingkungan Hidup***

PT Vale Indonesia Tbk menunjukkan komitmen terhadap pelestarian lingkungan melalui berbagai inisiatif strategis yang bertujuan meminimalisasi dampak ekologis dari kegiatan pertambangan. Salah satu program utama yang dilaporkan adalah rehabilitasi lahan bekas tambang seluas 205 hektar yang dilakukan sepanjang tahun 2023. Kegiatan rehabilitasi ini melibatkan proses revegetasi dengan tanaman lokal, pengendalian erosi, serta pemantauan terhadap kesuburan tanah. Langkah ini diambil guna memastikan bahwa kawasan pascatambang dapat kembali mendukung fungsi ekologisnya secara berkelanjutan.

Selain rehabilitasi, PT Vale juga melaporkan implementasi sistem pengelolaan tailing yang mengacu pada standar internasional. Limbah sisa proses produksi nikel ini dikelola melalui teknologi sedimentasi dan pemantauan yang ketat untuk menghindari pencemaran terhadap badan air di sekitar wilayah operasional. Monitoring kualitas air dan udara dilakukan secara berkala, melibatkan laboratorium terakreditasi dan pelaporan kepada otoritas lingkungan. Hal ini mencerminkan

komitmen perusahaan terhadap transparansi serta pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor lingkungan hidup.

Dalam upaya mitigasi perubahan iklim, PT Vale melaporkan keberhasilan dalam menurunkan emisi karbon sebesar 7% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini dicapai melalui efisiensi energi dan penggantian bahan bakar konvensional dengan bahan bakar rendah karbon. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah uji coba penggunaan *Hydrotreated Vegetable Oil* (HVO) sebagai alternatif B35. Meskipun HVO memiliki biaya yang lebih tinggi, namun penggunaannya memberikan kontribusi signifikan dalam menekan emisi gas rumah kaca. Inisiatif ini sejalan dengan arah kebijakan dekarbonisasi global dan menunjukkan bahwa perusahaan mulai mengintegrasikan aspek keberlanjutan ke dalam strategi operasionalnya secara proaktif. Sebagaimana disampaikan dalam laporannya:

“Pada bulan November 2024, perusahaan melakukan uji coba penggunaan *Hydrotreated Vegetable Oil* (HVO), yang memiliki emisi karbon lebih rendah dibandingkan B35 meskipun harganya lebih tinggi” (PT Vale Indonesia, 2024).

### **Pemberdayaan Masyarakat**

PT Vale Indonesia Tbk mengintegrasikan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari strategi keberlanjutan yang inklusif. Selama tahun 2024, perusahaan mengalokasikan dana sebesar AS\$4.000.198 (setara lebih dari Rp 120 miliar) untuk Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) yang mencakup wilayah Sorowako, Bahodopi, dan Pomalaa. Dana tersebut difokuskan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui program di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, serta penguatan kapasitas masyarakat. Pendekatan ini mencerminkan filosofi pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada nilai sosial jangka panjang.

“Selama tahun 2024, kami mengalokasikan dana sebesar AS\$4.000.198 untuk Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) di wilayah Sorowako, Bahodopi, dan Pomalaa” (PT Vale Indonesia, 2024)

Dalam sektor pendidikan, PT Vale melaksanakan berbagai program seperti penyediaan beasiswa untuk siswa berprestasi, pelatihan peningkatan kompetensi bagi tenaga pendidik, serta pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur sekolah. Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di daerah sekitar operasional perusahaan, dengan harapan dapat menciptakan generasi muda yang lebih siap menghadapi tantangan masa depan. Upaya ini tidak hanya berdampak langsung pada penerima manfaat, tetapi juga memberikan efek domino terhadap pembangunan sosial di tingkat komunitas.

Di bidang ekonomi dan sosial, perusahaan mendorong kemandirian masyarakat melalui pelatihan kewirausahaan dan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Kegiatan ini dilakukan melalui kolaborasi dengan mitra lokal serta lembaga pelatihan berbasis komunitas. Dengan menyediakan akses terhadap pelatihan keterampilan, permodalan, dan pasar, PT Vale berupaya menciptakan ekosistem ekonomi lokal yang tangguh dan tidak bergantung sepenuhnya pada kegiatan

tambang. Pendekatan ini juga diharapkan dapat mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.

### **Hubungan dengan Pemangku Kepentingan**

Hubungan harmonis antara perusahaan dan para pemangku kepentingan merupakan kunci keberhasilan implementasi strategi keberlanjutan. PT Vale menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan melalui forum konsultasi masyarakat, dialog terbuka, dan pendekatan partisipatif. Perusahaan secara rutin melibatkan tokoh masyarakat, pemerintah daerah, serta lembaga adat dalam merumuskan program-program sosial dan lingkungan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan dan tindakan korporat selaras dengan kebutuhan serta nilai-nilai lokal.

Mekanisme pelaporan pengaduan yang disediakan PT Vale juga menjadi salah satu sarana strategis dalam membangun akuntabilitas dan transparansi perusahaan. Masyarakat diberi ruang untuk menyampaikan keluhan, saran, dan masukan terkait operasional perusahaan secara langsung dan terstruktur. PT Vale menyatakan bahwa sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai media penyampaian aspirasi, tetapi juga sebagai alat evaluasi diri bagi perusahaan dalam merespons dinamika sosial yang berkembang di lapangan. Melalui pendekatan ini, perusahaan berupaya membangun kepercayaan dan legitimasi di mata masyarakat.

Lebih jauh, PT Vale menginisiasi program kolaboratif dengan berbagai pemangku kepentingan lintas sektor, termasuk LSM, institusi pendidikan, dan sektor swasta. Kolaborasi ini ditujukan untuk menciptakan sinergi dan inovasi dalam menjalankan program keberlanjutan. Dengan mengedepankan transparansi, dialog konstruktif, dan kolaborasi yang setara, perusahaan menunjukkan komitmen terhadap prinsip-prinsip tata kelola keberlanjutan yang responsif dan inklusif. Hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan juga diyakini akan meningkatkan resiliensi sosial perusahaan di tengah kompleksitas operasional industri ekstraktif.

“Kami terus mendorong dialog terbuka dan kolaborasi yang konstruktif agar solusi yang dihasilkan benar-benar berakar pada kebutuhan masyarakat” (PT Vale Indonesia, 2024).

### **Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)**

PT Vale melaporkan bahwa tingkat kecelakaan kerja mengalami penurunan signifikan dan telah mencapai *zero fatality* pada 2023.

“Sepanjang 2024, PT Vale berhasil mempertahankan *zero fatality* dan mencatat tingkat kecelakaan kerja terendah dalam sejarah perusahaan” (PT Vale Indonesia, 2024).

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan prioritas utama bagi PT Vale dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Perusahaan menyampaikan bahwa selama tahun 2024 berhasil mempertahankan pencapaian *zero fatality*, serta mencatat tingkat kecelakaan kerja terendah dalam sejarah perusahaan. Capaian ini diperoleh melalui penerapan sistem manajemen keselamatan kerja berbasis ISO 45001:2018, yang memberikan kerangka kerja untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan

mengendalikan risiko-risiko K3 secara sistematis. Selain itu, perusahaan juga menerapkan budaya keselamatan melalui pelatihan rutin dan kampanye internal yang bertujuan meningkatkan kesadaran pekerja.

PT Vale menyadari bahwa pencegahan kecelakaan kerja tidak hanya bergantung pada sistem manajerial, tetapi juga pada partisipasi aktif seluruh karyawan. Oleh karena itu, perusahaan menekankan pentingnya budaya kerja yang berorientasi pada keselamatan dengan mendorong pelaporan insiden dan hampir celaka (*near miss*). Setiap laporan yang masuk dianalisis secara mendalam untuk dijadikan dasar dalam perbaikan sistem. Komitmen ini mencerminkan bahwa keselamatan kerja bukan hanya tanggung jawab manajemen, tetapi menjadi bagian integral dari etos kerja seluruh elemen organisasi.

Dalam kesehatan kerja, PT Vale juga melaksanakan pemeriksaan kesehatan berkala dan program promosi kesehatan di lingkungan kerja. Program ini mencakup penyediaan fasilitas medis, edukasi gaya hidup sehat, serta dukungan psikologis bagi karyawan. Dengan pendekatan holistik ini, perusahaan tidak hanya menjaga keselamatan fisik, tetapi juga kesejahteraan mental dan sosial para pekerja. Strategi ini diyakini akan berkontribusi terhadap produktivitas dan keberlangsungan operasional perusahaan secara jangka panjang.

### **Kepatuhan terhadap Regulasi dan Tata Kelola**

PT Vale Indonesia Tbk dalam laporan keberlanjutan 2024 menegaskan komitmennya terhadap kepatuhan hukum dan penguatan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Sepanjang periode pelaporan, perusahaan mengklaim tidak ditemukan pelanggaran signifikan terhadap regulasi lingkungan hidup. Kepatuhan ini dibuktikan melalui pelaksanaan audit lingkungan oleh pihak ketiga independen, serta pemenuhan terhadap persyaratan dokumen AMDAL dan izin lingkungan lainnya. Hal ini mencerminkan keseriusan perusahaan dalam menjaga legitimasi operasional dan mengelola risiko hukum yang dapat timbul dari ketidakpatuhan.

Dalam aspek tata kelola, PT Vale terus memperkuat sistem antikorupsi dan integritas melalui implementasi kebijakan etika bisnis dan sistem *whistleblowing*. Perusahaan memberikan pelatihan rutin kepada seluruh level karyawan mengenai nilai-nilai etika, kode etik, serta mekanisme pelaporan pelanggaran. Dengan menyediakan jalur pelaporan yang aman dan bebas dari tekanan, perusahaan mendorong budaya organisasi yang transparan dan bertanggung jawab. Kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan lainnya terhadap integritas operasional perusahaan.

Selanjutnya, PT Vale menerapkan prinsip-prinsip tata kelola berbasis ESG (*Environmental, Social, Governance*) dalam proses pengambilan keputusan strategis. Dewan direksi dan komite audit secara aktif mengawasi pelaksanaan kebijakan keberlanjutan dan pengelolaan risiko, serta memastikan bahwa seluruh kegiatan bisnis dilakukan secara etis dan bertanggung jawab. Melalui pendekatan ini, perusahaan tidak hanya mengejar kinerja finansial, tetapi juga menciptakan nilai jangka panjang

bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Tata kelola yang kuat dianggap sebagai fondasi penting dalam membangun keberlanjutan korporasi di era bisnis modern.

### **Tanggapan Masyarakat Sipil dan Komunitas Lokal terhadap Operasional dan Praktik CSR PT Vale Indonesia**

#### ***Tanggapan dan Kritik dari WALHI terhadap Operasional PT Vale Indonesia***

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) secara konsisten menyuarakan kritik terhadap dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan nikel PT Vale Indonesia. Dalam pernyataannya tahun 2024, WALHI menyoroti bahwa klaim keberlanjutan dalam laporan perusahaan sering kali tidak mencerminkan realitas yang dialami masyarakat di sekitar wilayah tambang.

WALHI mengungkapkan kekhawatiran atas kerusakan ekologis yang terus terjadi di wilayah operasi PT Vale, terutama di Sorowako dan sekitarnya. Mereka menilai bahwa reklamasi lahan yang dilakukan tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas tambang. Selain itu, WALHI menyebut adanya ketidakterbukaan informasi dalam proses perizinan dan perluasan konsesi lahan, yang dinilai mengabaikan hak-hak masyarakat adat dan lokal.

Lebih lanjut, WALHI menyoroti bahwa kontribusi sosial perusahaan, seperti program pemberdayaan masyarakat, masih bersifat karitatif dan belum menyentuh akar struktural ketimpangan ekonomi yang ditimbulkan oleh industri ekstraktif. Kritik juga diarahkan pada proses konsultasi publik yang dinilai formalitas belaka dan tidak mencerminkan partisipasi bermakna dari masyarakat terdampak (WALHI, 2024).

#### ***Tanggapan dari Asosiasi Petani Lada (APL) Loeha Raya terhadap aktivitas PT Vale Indonesia***

Asosiasi Petani Lada Loeha Raya (APL) secara tegas menyatakan penolakannya terhadap rencana eksplorasi tambang nikel oleh PT Vale Indonesia di Blok Tanamalia, Luwu Timur. Dalam berbagai pernyataan sepanjang tahun 2024, APL menilai bahwa aktivitas pertambangan yang direncanakan perusahaan akan berdampak serius terhadap lahan pertanian lada yang menjadi sumber utama mata pencaharian ribuan petani. Mereka menyoroti bahwa wilayah yang akan dijadikan lokasi tambang merupakan kawasan produktif yang selama ini menopang ketahanan ekonomi lokal, dan eksplorasi tambang akan mengancam ekosistem serta sumber air bersih masyarakat.

Ketua APL, Yahya Mukhtar, menyatakan bahwa PT Vale belum pernah melakukan konsultasi publik secara menyeluruh dan bermakna dengan masyarakat terdampak, khususnya petani dan perempuan yang berada di garis depan risiko lingkungan. APL juga mengkritisi proses konsultasi yang dilakukan oleh perusahaan karena hanya melibatkan tokoh-tokoh tertentu dan tidak mewakili suara komunitas secara luas. Pada April 2024, APL bersama Pejuang Perempuan Loeha Raya menggelar aksi damai di Jakarta pada saat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Vale Indonesia untuk menuntut pelepasan Blok Tanamalia dari konsesi perusahaan.

Tabel 1. Analisis Perbandingan Laporan Keberlanjutan dan Realitas Empiris

Aspek	Laporan Keberlanjutan PT Vale (2024)	Fakta di Lapangan (WALHI & APL, 2024)	Analisis gap
Pengelolaan Lingkungan	PT Vale menyampaikan komitmen pelestarian lingkungan melalui reklamasi 205 hektar lahan bekas tambang, pengelolaan <i>tailing</i> sesuai standar lingkungan, dan penurunan emisi karbon sebesar 7% dibanding periode sebelumnya.	WALHI menyoroti bahwa reklamasi masih menyisakan kerusakan ekologis, risiko deforestasi, pencemaran <i>tailing</i> , dan dampak terhadap kualitas air. APL menekankan bahwa pembahasan tindak lanjut dampak lingkungan masih minim.	Laporan lebih menonjolkan capaian program, sementara pembahasan dampak yang masih terjadi dan mekanisme penyelesaian belum dijelaskan secara seimbang menurut narasi eksternal.
Pemberdayaan Masyarakat	PT Vale menggambarkan pendekatan kolaboratif melalui pengalokasian dana pemberdayaan sebesar Rp120 miliar, pembangunan infrastruktur desa, pelatihan pendidikan, dan forum aspirasi publik.	APL menyoroti rendahnya pelibatan masyarakat dalam tahap perencanaan dan evaluasi. WALHI menilai program sosial belum menyentuh penguatan ekonomi atau kepemilikan aset produktif masyarakat terdampak.	Narasi perusahaan menampilkan aktivitas bantuan, namun belum menunjukkan perubahan struktural pada kondisi sosial-ekonomi masyarakat menurut dokumen perbandingan.
Partisipasi Masyarakat/ FPIC	Perusahaan mengklaim menerapkan prinsip transparansi dan inklusivitas dengan menyediakan forum konsultasi dan kanal aspirasi bagi masyarakat sekitar tambang.	Forum dinilai belum inklusif secara luas karena hanya melibatkan kelompok tertentu yang dekat dengan jaringan sosial perusahaan dan berlangsung seremonial dengan formalitas tinggi.	Implementasi FPIC dalam laporan lebih menekankan keberadaan forum, tetapi belum menggambarkan kualitas partisipasi dan sejauh mana suara warga benar-benar diakomodasi.
Kepatuhan Regulasi & Tata Kelola	PT Vale menyatakan tidak terdapat pelanggaran signifikan selama periode pelaporan serta telah menjalankan audit lingkungan, pengawasan internal, dan penguatan budaya etika bisnis sebagai bentuk <i>good governance</i> .	WALHI menilai masih terdapat persoalan proses perizinan, dampak konsesi tambang, dan masalah transparansi data yang tidak sepenuhnya dibuka ke publik. APL menyoroti ketidakseimbangan proses partisipasi dalam isu kelola lingkungan dan sosial.	Laporan perusahaan cenderung menampilkan kepatuhan normatif, sementara dokumen perbandingan mencatat adanya isu perizinan dan representasi suara publik yang belum sepenuhnya adil dan transparan.
Konflik Lahan/ Konsesi	Laporan keberlanjutan tidak menjelaskan secara eksplisit adanya konflik lahan atau resistensi masyarakat terhadap operasi perusahaan.	WALHI dan APL mencatat adanya penolakan masif terhadap rencana eksplorasi di wilayah konsesi tambang (salah satunya di Tamaila), termasuk demonstrasi yang besar yang dilakukan masyarakat.	Perusahaan cenderung menghindari narasi konflik dalam laporan, sedangkan dokumen eksternal memuat bukti adanya resistensi dan penolakan yang berdampak langsung pada legitimasi sosial perusahaan.

Lebih lanjut, APL menuntut agar PT Vale menjalankan prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC) dalam setiap proses eksplorasi, serta memastikan proses dialog berlangsung tanpa kehadiran aparat keamanan agar masyarakat dapat menyampaikan sikap mereka secara bebas. APL menilai bahwa jika eksplorasi tetap dilanjutkan, maka ribuan petani, buruh tani, dan pelaku ekonomi lokal akan terdampak secara sosial dan ekonomi dalam jangka panjang (Dedy, 2024).

Dari perbandingan tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat ketimpangan antara apa yang diklaim oleh PT Vale Indonesia dalam laporan keberlanjutannya dengan kondisi yang dirasakan oleh masyarakat. Meskipun perusahaan telah melaporkan berbagai pencapaian dalam aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola, tanggapan dari organisasi masyarakat sipil dan komunitas lokal menunjukkan bahwa masih terdapat persoalan mendasar yang belum terselesaikan, khususnya terkait transparansi, partisipasi publik, serta dampak ekologis dan sosial dari kegiatan pertambangan.

Dalam teori legitimasi, perusahaan berupaya mempertahankan eksistensinya di mata publik. Laporan keberlanjutan menjadi salah satu alat strategis untuk membangun citra tersebut, meskipun belum tentu mencerminkan keseluruhan realitas yang terjadi. Upaya membangun citra melalui pengungkapan aktivitas CSR juga diamati dalam penelitian (Arizah *et al.*, 2020), yang menunjukkan bahwa PT Adaro Energy secara aktif memublikasikan kegiatan CSR-nya melalui website dan media sosial perusahaan selama pandemi COVID-19. Pada kasus PT Vale Indonesia, strategi serupa tampaknya juga diterapkan melalui publikasi kegiatan CSR yang bertujuan membentuk citra positif di mata publik, meskipun efektivitas dan kesesuaiannya dengan kondisi nyata di lapangan masih menjadi perdebatan.

Penekanan terhadap peran komunikasi CSR dalam membentuk persepsi publik juga disampaikan oleh (Tino & Sudana, 2024), yang menjelaskan bahwa CSR memiliki peran strategis dalam meningkatkan profitabilitas perusahaan melalui mediasi green accounting dan kinerja lingkungan. Dalam konteks ini, publikasi kegiatan CSR melalui berbagai saluran komunikasi berpotensi membangun pandangan positif masyarakat terhadap perusahaan, meskipun belum tentu sepenuhnya merepresentasikan kondisi yang terjadi.

## 5. Kesimpulan

Studi ini menegaskan bahwa narasi dalam Laporan Keberlanjutan PT Vale Indonesia tahun 2024 belum sepenuhnya selaras dengan realitas sosial dan lingkungan yang tercermin dalam dokumen WALHI serta Asosiasi Petani Lada Loeha Raya. Perusahaan menonjolkan capaian positif pada aspek reklamasi lahan, pengurangan emisi, dan pelaksanaan program CSR, sementara dokumen eksternal menunjukkan adanya isu lingkungan yang masih berlangsung serta keterbatasan pelibatan masyarakat dalam proses evaluasi. Temuan ini menekankan bahwa laporan keberlanjutan perlu dibaca secara kontekstual, dengan menjadikan suara komunitas lokal sebagai indikator penting dalam menilai keberhasilan praktik CSR.

Secara praktis, perusahaan disarankan untuk memperluas laporan dengan memuat mekanisme tindak lanjut dampak lingkungan, membuka ruang partisipasi yang lebih inklusif dalam evaluasi CSR, serta menguatkan program pemberdayaan berbasis aset produktif agar manfaat sosialnya lebih terukur secara jangka panjang. Dari sisi kebijakan publik, diperlukan penguatan regulasi pengungkapan dampak tambang yang mendorong transparansi, pemantauan berkala yang dapat diakses publik, dan model evaluasi CSR yang mensyaratkan keterlibatan aktif masyarakat terdampak.

Untuk penelitian selanjutnya, kajian dapat diarahkan lebih spesifik pada (1) evaluasi efektivitas program reklamasi dan pengelolaan tailing dalam jangka panjang, (2) model pelibatan masyarakat dalam proses evaluasi CSR yang benar-benar partisipatif, serta (3) dampak program CSR terhadap ketahanan ekonomi komunitas lokal berbasis kepemilikan aset atau komoditas unggulan daerah. Perluasan ini diharapkan dapat memberikan dasar riset lanjutan yang lebih konkret bagi isu keberlanjutan sektor pertambangan di Indonesia.

## Referensi

- Anugerah, D., & Sisdiyanto, E. (2024). Implementasi CSR Berkelanjutan di Sektor Pertambangan: Strategi untuk Meningkatkan Citra dan Keberlanjutan Perusahaan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(4), 449–462. <https://doi.org/10.61722/jemba.v1i4.537>
- Arizah, A., Darwin, K., Ramly, R., & Abbas, A. (2020). Pandemi COVID-19 dan Gebu CSR pada Perusahaan Adaro Energy. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 4(4). <https://doi.org/10.58258/jisip.v4i4.1480>
- Carroll, A. B. (1999). Corporate Social Responsibility Evolution of a Definitional Construct. *Business & Society*, 38(3), 268–295. <https://doi.org/10.1177/000765039903800303>
- Dedy. (2024). *Petani Lada Loeha Raya Bantah Klaim Pertemuan dengan PT Vale*. Herald Sulsel.
- Fadillah, M. R. R., Rismayadi, B., & Yanti, Y. (2024). Pengaruh Kinerja Lingkungan Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Keuangan. *Gorontalo Accounting Journal*, 7(2), 286. <https://doi.org/10.32662/gaj.v7i2.3488>
- Freeman, R. E. (1984). *Strategic Management: A Stakeholder Apporoach*. Pitman.
- Gressy, G., & Setiawan, T. (2024). Perkembangan Penelitian Corporate Social Responsibility (CSR) Di Indonesia Selama 15 Tahun (Perspektif Studi Literatur). *Jesya*, 7(1), 987–911. <https://doi.org/10.36778/jesya.v7i1.1498>
- Gresya, J., & Surianti, M. (2024). Pengaruh Penerapan Green Accounting, Kinerja Lingkungan dan Profitabilitas terhadap Sustainable Development Goals. *JAKP: Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Perpajakan*, 7(1), 66–77. <https://doi.org/10.51510/jakp.v7i1.1759>
- Handayani, N., & Sari, S. P. (2025). Mewujudkan Sustainable Development Goals: Implementasi Pengelolaan Lingkungan pada Perusahaan Pertambangan di Indonesia. *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan*, 5(2), 491–501. <https://doi.org/10.55047/transekonomika.v5i2.874>
- Hilson, G. (2012). Corporate Social Responsibility in the extractive industries: Experiences from developing countries. *Resources Policy*, 37(2), 131–137. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2012.01.002>
- Irmayana, Astaria, N., & Feriawan, F. U. (2020). *Metode Pengumpulan Data Melalui Studi Dokumen Dalam Penelitian*. Academia.Edu.
- Jenkins, H., & Yakovleva, N. (2006). Corporate social responsibility in the mining industry: Exploring trends in social and environmental disclosure. *Journal of Cleaner Production*, 14(3–4), 271–284.

<https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2004.10.004>

Khairunnisa, N., & Rosdiana, Y. (2024). Pengaruh Corporate Social Responsibility Disclosure dan Eco Efficiency terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Riset Akuntansi*, 83–90. <https://doi.org/10.29313/jra.v4i2.5119>

KPMG International. (2020). *The Time Has Come: The KPMG Survey of Sustainability Reporting 2020*.

Lyon, T. P., & Montgomery, A. W. (2015). The Means and End of Greenwash. *Organization & Environment*, 28(2), 223–249. <https://doi.org/10.1177/1086026615575332>

Muttakin, M. B., & Khan, A. (2014). Determinants of corporate social disclosure : Empirical evidence from Bangladesh. *International Journal of Cardiology*. <https://doi.org/10.1016/j.adiac.2014.03.005>

PT Vale Indonesia. (2024). *Laporan Keberlanjutan PT Vale Indonesia 2024*. PT Vale Indonesia.

Rohim, A., & Hamid, M. (2023). Program CSR PT. Vale Indonesia di Sorowako Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur. *Journals of Social, Science, and Engineering*, 2(2), 157–166.

Suchman, M. C. (1995). Managing legitimacy: Strategic and Innovative Approaches. *Academy of Management Review*, 20(3), 571–610.

Tino, I. W. R., & Sudana, I. P. (2024). Peran Corporate Social Responsibility Memediasi Pengaruh Penerapan Green Accounting dan Kinerja Lingkungan Terhadap Profitabilitas Perusahaan yang Terdaftar di Bei. *Gemawisata: Jurnal Ilmiah Pariwisata*, 21(1), 17–32. <https://doi.org/10.56910/gemawisata.v21i1.428>

WALHI. (2024). *Aksi depan Kantor PT Vale Indonesia, WALHI Sulsel Tuntut Keluarkan Moratorium dan Hentikan Eksplorasi Tambang Nikel di Blok Tanamalia*. WALHI.

Yasin, S. F., Idris, H., & Rijal, A. (2024). Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Profitabilitas Perusahaan Sub Sektor Pertambangan Logam dan Mineral Lainnya yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced*, 3(1), 1–15. <https://doi.org/10.61579/future.v3i1.198>